



25-29th
September 2016

Montpellier, France
CORUM CONFERENCE CENTER

43rd
IAH
congress



Indonesian Water Law Cancellation

A Journey of Indonesian Water User

Azwar Satria Muhammad
Indonesia

Muhammad, A.S.⁽¹⁾, Hidayat, R.⁽²⁾, Beon, O.⁽³⁾, Hadian, MSD⁽⁴⁾, Hendarmawan⁽⁵⁾

N°abstract: 1883

Indonesian Water Law Cancellation

A Journey of Indonesian Water User



**18 February 2015
Water Law
No.7 year 2004
Cancelled**

**Harus dikuasai Negara, Sumber Daya Air
Diserahkan Swasta**

NASIONAL
© 12 Maret 2015 - 04:09

JAKARTA, (PRLM). - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No.11 tahun 2002 tentang Sumber Daya Air (SDA), maka daerah perlu menyiapkan untuk terlibat dalam pengelolaan air, sehingga berupa persn untuk swasta, provinsi, kabupaten dan kota agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang justru akan menyulitkan rakyat.

"Apalagi air makin komersial dan alam makin rusak. Hanya saja harus melibatkan semua stakeholder, bahwa air harus dikuasai oleh negara, dan bagaimana air itu benar-benar bersih, sehat dan bermanfaat teranekek rakyat, kata Ketua Komite II DPD RI Parliindungan Purba dalam dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbadi, dan aktivis Walhi.

Sementara itu, Menteri Sumber Daya Air, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pemerintah akan mengulangi proses penyusunan undang-undang SDA yang konstitusional, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya air.

"Jadi, pemerintahan Jokowi harus konsisten dengan amanat konstitusi, bahwa air itu harus dikuasai Negara dan memberdayakan BUMD," tutur amntan anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta ini.

**Water resources
should managed by
state.
No Privatization**



**President : Re-
arrange contract
of Bottled water
company**

**Pemerintah perketat peng
minum kemasan**

Sabtu, 24 Februari 2015 / 18:01 WIB

7
GAMBAR



**Government
restrict bottled
water license**

BERITA TERKINI
Tanggapan Presiden soal UU Sumber Daya Air
MK membatalkan UU Sumber Daya Air
Tali soal UU UU Sumber Daya Air dibatalkan MK



Sebagai catatan, Rabu 18 Februari 2015 lalu, MK mengabulkan uji materi UU Sumber Daya Air yang diajukan salah satunya oleh Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

MK membatalkan UU Sumber Daya Air, karena beleid tersebut tidak memampukan roh asas hak pengetahuan air oleh negara seperti yang diamanatkan UU 1945.

Menurut MK, air adalah unsur penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, dan akses terhadap air adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

Muhammadiyah Minta Kontrak Pengelolaan Air Swasta Dihentikan

Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak agar seluruh kontrak dan izin pengelolaan air baik oleh perusahaan swasta domestik maupun asing dibatalkan demi hukum. Termasuk pengelolaan air minum yang dijual dalam bentuk kemasan.



Ilustrasi air bersih (istimewa)

Hal tersebut disampaikan Muhammadiyah menyikapi putusan pembatalan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (23/2).

MK tidak hanya mengabulkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk uji materi, melainkan mencabut dan menghapus UU SDA secara keseluruhan.

"Kami menyambut gembira seluruh pasal dibatalkan, termasuk air minum dalam kemasan," kata Ketua Umum Muhammadiyah, A. La Nyalla.

**Privatization
should stop**

Din menilai, seharusnya pemerintah harus lebih besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sekaligus ketua tim pemohon uji materi UU SDA, Syaiful Bachri. Menurutnya, dikabulkannya uji materi UU SDA merupakan langkah maju perlindungan terhadap SDA di Tanah Air. Penerapan pasal-pasal di UU ini dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna.

"Issue on water right"

What about Water Sustainability ??



25-29th
September 2016

Montpellier, France
CORUM CONFERENCE CENTER

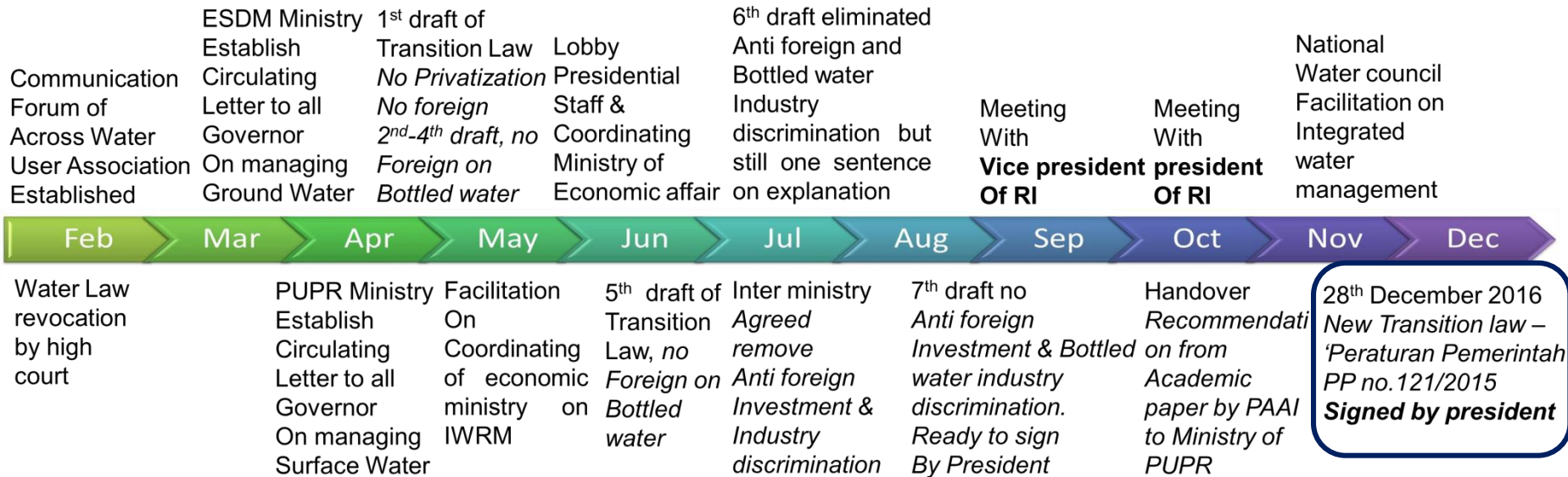
**43rd
IAH
congress**



Courtesy : www.cnnindonesia.com, www.finance.detik.com, www.pikiran-rakyat.com, www.nasional.kontan.co.id

www.beritasatu.com

The Journey



Hydro-geologist: Turn problem into Opportunities

New Water Law:

NEXT JOURNEY

comprehensive water management system as well as all the associated regulations

- New law should applied to all water user not just specific industries
- Highlight on Groundwater management & protection
- Synchronized and balance the policy between groundwater and surface water
- Educated Indonesian water stake holder on water sustainability

Acknowledgement: The authors would like to express special appreciation for the support to the Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, Persatuan Ahli Air Tanah Indonesia, Ground Water Working Group



Montpellier, France
CORUM CONFERENCE CENTRE